



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 1, JUNI 2018

DAFTAR ISI

E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY Ahmad Fuadillah Sam	1
MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir	15
HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro	31
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati	47
JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari	61
TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady	75
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna, Subagio, dan Budi Irawanto	89
KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso	105
RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi	121
TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah	137



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 1, 2018

DAFTAR ISI

E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY Ahmad Fuadillah Sam	1
MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir	15
HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro	31
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati	47
JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari	61
TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady	75
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)	89
KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso	105
RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi	121
TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah	137



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 41

NOMOR 1, SEPTEMBER 2016

DDC: 302.3**Ahmad Fuadillah Sam****E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY****ABSTRAK**

Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.

Kata kunci: *Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communalities, Jakarta Smart City*

DDC: 305.8**Ibnu Nadzir****MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIK INDONESIA DI BELANDA****ABSTRAK**

Artikel ini mengeksplorasi keterlibatan daring dan luring dari eksil Indonesia di Belanda. Dengan melihat praktik penggunaan internet mereka, artikel ini menegaskan argumen yang menyatakan pentingnya melihat praktik budaya dan sosial di kedua arena tersebut sebagai satu kesatuan. Untuk menguraikan argumen tersebut, artikel ini menganalisis dua kasus penting yang menunjukkan keterlibatan daring dan luring eksil Indonesia, yaitu berbagai kegiatan IPT 1965 dan diskusi forum. Untuk menangkap praktik sosial dan budaya yang dilakukan di wilayah luring maupun daring, penelitian ini juga dilakukan dalam dua wilayah tersebut secara bersamaan. Penelitian ini sendiri diawali dari dua pertanyaan penting, pertama, bagaimana eksil Indonesia menggunakan keterlibatan daring dan luring untuk memobilisasi perjuangan mereka? Kedua, bagaimana keterlibatan daring dan luring mereka memengaruhi keberadaan mereka sebagai komunitas yang tersingkirkan? Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan eksil Indonesia dalam ruang daring dan luring dilakukan dengan sangat cair. Implikasinya, peristiwa dan berbagai praktik yang dilakukan dalam kedua ruang tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, artikel ini meminjam kerangka analisis Jackson (2013) mengenai kegiatan bercerita untuk melihat bahwa keterlibatan daring dan luring telah memungkinkan eksil Indonesia untuk merebut kembali perasaan menjadi Indonesia.

Kata Kunci: *daring, luring, keindonesiaan, eksil, internet*

DDC: 302.2

Triyono Lukmantoro

HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN

ABSTRAK

Pada akhir Desember 2016, muncul hoaks yang menyatakan bahwa ada sekitar sepuluh juta, bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Meskipun kabar bohong itu telah dibantah keras dan dianggap sebagai fitnah oleh pemerintah, kenyataannya, hoaks itu telanjur merebak. Salah satu situs yang memproduksi hoaks ini adalah Postmetro. Artikel ini merupakan kajian tekstual terhadap berbagai judul hoaks yang ditampilkan oleh Postmetro. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai hoaks itu tidak lebih merupakan praktik-praktik “jurnalisme Frankenstein,” yakni sekadar mengambil berita dan memoles bagian judulnya supaya sedemikian provokatif dari sumber-sumber pemberitaan media lain. TKA ilegal dari Tiongkok dideskripsikan sebagai pihak asing yang memperburuk kehidupan buruh nasional. Hal ini menunjukkan bahwa TKA ilegal dari Tiongkok itu diposisikan sebagai sosok yang menimbulkan kepanikan moral. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai setan rakyat yang memang pantas untuk dilaknat dan diusir dari Indonesia karena telah menciptakan ketakutan dan berwatak patologis.

Kata kunci: *hoaks, tenaga kerja asing dari Tiongkok, kepanikan moral, budaya ketakutan*

DDC: 302.2

Nina Widyawati

KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL¹

ABSTRAK

Digital adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi perubahan struktur masyarakat dari mass ke mass-self. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya massa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memfasilitasi individu untuk memproduksi konten sehingga lahirnya masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumer). Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui ekspose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audience aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Namun, media digital belum sepenuhnya egaliter dan demokratis karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi.

Kata kunci: *budaya digital, prosumsi, komodifikasi, demokrasi semu*

¹ Data penelitian ini diambil dari FGD dalam rangka pengumpulan data penelitian “Media Baru dan Perubahan Masyarakat Pasca Orde Baru, Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru” yang belum pernah dipublikasikan.

DDC: 302.2

Dian Tri Hapsari

JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN

ABSTRAK

Di Indonesia sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Di tengah meningkatnya pertumbuhan pengguna Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga terbilang sebagai media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada bagaimana radio sebagai media tradisional bertransformasi menjadi media baru di era digital. Garis besar tulisan ini membahas transformasi radio sebagai media baru dari sisi model aksesnya yang menggunakan Internet dan bagaimana perubahan regulasi siaran radio memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa dengan adanya perubahan tersebut, radio bukan saja beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, namun juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunaannya. Pascareformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti oleh pertumbuhan jumlah informasi radio yang dinilai sebagai perubahan ekspresi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Namun, perkembangan akses radio juga memunculkan gejala spiral of silence tentang relasi wacana mayoritas yang harus menjadi perhatian radio sebagai media alternatif pada era digital. Perimbangan suara yang terisolir dalam argumen teori spiral of silence menjadi tantangan radio pada era digital ini. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji opini publik pada radio sebagai media digital interaktif dengan menggunakan teori spiral of silence.

Kata Kunci: Radio, teknologi, media baru, jurnalisme, media tradisional, Opini Publik, Spiral of Silence.

DDC: 390.9

Ahmad Helmy Fuady

TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi karena sifat teknologi yang bias modal dan keterampilan. Selain itu, otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangganya. Pembangunan TIK antarwilayah juga masih sangat timpang. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan pembangunan TIK lebih menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.

Kata Kunci: teknologi digital, ketimpangan, disrupsi, indeks pembangunan TIK

DDC: 302.2

Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto)**

BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS²

ABSTRAK

Kemunculan teknologi Web 2.0 memungkinkan para pengguna internet tidak lagi terbatas menjadi konsumen yang mampu membaca, menjelajah, dan mengonsumsi konten internet saja. Lebih dari itu, kini pengguna dapat terlibat aktif menjadi konsumen sekaligus produsen (prosumer). Salah satu platform digital yang menjadi tren dalam satu dekade terakhir adalah news aggregator. Penelitian ini membahas aktivitas produksi-konsumsi (prosumsi) tulisan-tulisan sebagai bagian dari digital labor (pekerja digital) oleh para penulis konten di aplikasi UC News,

² Tulisan ini merupakan bagian dari tesis yang disusun oleh Maruti Asmaul Husna Subagio (2018) dengan judul "Prosumsi Penulis Konten dalam Platform News Aggregator (Fenomena Digital Labor Penulis Konten dalam Aplikasi UC News) pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

salah satu news aggregator terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik-praktik prosumsi yang dilakukan oleh penulis konten UC News dikaitkan dengan posisinya sebagai pekerja digital. Metodologi yang digunakan adalah etnografi virtual untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan digital yang termediasi internet. Data didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka kepada enam orang informan yang dipilih berdasarkan variasi tingkat keaktifan dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Selain itu, data sekunder penulis dapatkan dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di media UC News. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penulis konten melakukan praktik prosumsi dengan cara yang beragam, mulai dari mencari sendiri informasi tulisan (*witness journalism*) hingga mengolah informasi yang ada di media maupun literatur untuk dibuat tulisan baru. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk kapitalisme era prosumer tidak sebatas memengaruhi penulis konten melakukan aktivitas produksi dan konsumsi saja, namun juga meluas pada distribusi dan marketisasi oleh para user sendiri.

Kata kunci: penulis konten, news aggregator, prosumsi, Web 2.0

DDC: 305.4

Widjajanti M Santoso³

KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

ABSTRAK

Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan “ibuisme” pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menghalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan “baru” terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.

Kata Kunci: femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan

Rosita Dewi

RINGKASAN DISERTASI

ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA

Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai solusi menang-menang (*win-win solution*) upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya celah yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (*corrupted recognition*) melalui pembentukan Lembaga

³ Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.

Kata kunci: rekognisi, adat, MIFEE, otonomi khusus, Papua, lembaga masyarakat adat, pemetaan partisipatif

Fachri Aidulsyah

TINJAUAN BUKU

ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA

Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 1, 2018

DDC: 302.3**Ahmad Fuadillah Sam****E-NETWORK SOCIETY: CITIZENS COMMUNALITY IN SMART CITY CONTEXT****ABSTRACT**

Smart city is an informational society's product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city's implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens' communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen's trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communalism, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.

Keywords: *Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communalism, Jakarta Smart City*

DDC: 305.8**Ibnu Nadzir****RECLAIMING INDONESIAN-NESS: ONLINE AND OFFLINE ENGAGEMENT OF INDONESIAN EXILES IN NETHERLANDS****ABSTRACT**

This article explores online-offline engagements of Indonesian exiles in Netherlands. By looking into their internet practices, this article affirms the notion that it is essential for Internet research to comprehend social and cultural practices engaged in both space as an entanglement. To elaborate the argument, this article analyzed two important cases where the online-offline engagements are performed by Indonesian exiles, which are IPT 1965 events and Diskusi Forum (forum discussion). Since the social and cultural practices were performed online and offline, this research is also conducted in both spaces simultaneously. The research itself was initiated from two main questions, first, how do Indonesian exiles employed online-offline engagement to mobilize their cause? Second, how do their online-offline engagement affect their existence as a displaced community? The article then argues that the engagement enacted by Indonesian exiles is performed fluidly in online-offline spaces. In consequence, events and practices in both arenas are influential to one another. Moreover, borrowing the framework of Jackson (2013) on storytelling, this article shows that the online-offline engagements has enabled Indonesian exiles to reclaim the sense of being Indonesian.

Keywords: *online, offline, Indonesian-ness, exiles, Internet*

DDC: 302.2

Triyono Lukmantoro

THE HOAXES OF ILLEGAL FOREIGN WORKERS FROM CHINA: MORAL PANICS AND CULTURE OF FEAR

ABSTRACT

At the end of December 2016, several hoaxes emerged stating that there were about ten million, even twenty million, illegal foreign workers from China who were invading Indonesia. Although the hoaxes have been strongly denied and regarded as slander by the government, in fact, the hoaxes were already spreading. One of the sites that produce these hoaxes is *Postmetro*. This article is a textual review of various hoax titles displayed by *Postmetro*. The results of this study show that the various hoaxes are no more than the practices of “Frankenstein journalism,” which is simply taking news and polishing the title to be so provocative from other media sources. The illegal foreign workers from China are described as the foreigner who exacerbates the life of national laborers. This shows that illegal foreign workers from China were positioned as a figure that caused moral panics. In addition, they are also described as demons of the people (folk devils) who deserve to be cursed and expelled from Indonesia for creating fear and pathological character.

Keywords: hoax, illegal foreign workers from China, moral panics, culture of fear

DDC: 302.2

Nina Widyawati

COMMODIFICATION OF PRIVACY AND PSEUDO-DEMOCRACY IN DIGITAL CULTURE

ABSTRACT

Digital is the development of information and communications technology, that changes the social structure, from mass to mass-self. Segmented digital media messages have shifted the culture, from mass culture to custom. Digital technology delivers social media platforms that facilitate individuals in producing content. Now individuals are a producers as well as consumers (prosumer), and assumed in contributing toward egalitarian society, as a neutral public space. The aim of this research are analyzes the behavior of prosumption in the daily practice of internet generation that is Y and Z generation and its implication to social interaction. The subject of research is a student of Communication Studies Program, Atma Jaya University Yogyakarta. The approach used is qualitative, and data collection is through focus group discussion (FGD). The results showed that all informants were prosumer. They are producing by everyday life exposition. On the one hand, informants are active audience in consuming the human interest information, on the other hand, they are passive audience in consumption social and political information. Many of them obtain information from the news portal and community. Digital technology increases productivity because individuals are able to do more than one activity simultaneously such as a student and workers. Unfortunately, digital media has not been egalitarian and democratic sphere, as the effect the virtual communities may decrease the freedom of expression.

Keywords: digital culture, prosumption, commodification, pseudo-democracy

DDC: 302.2

Dian Tri Hapsari

RADIO JOURNALISM IN DIGITAL ERA: TRANSFORMATION AND CHALLENGE

ABSTRACT

During the periode of 2015, in Indonesia, a number of print newspapers decided to stop publishing their printing media and switch to digital. This is also challenging for radio since it could be considered as traditional media such as the printing media. In this article, the authors explain how radio as a traditional mass-media is transformed into a new medium in the digital era. The outline of this paper discusses radio transformation as a new medium in terms of access model that uses the Internet and radio broadcast regulatory changes affect the democratic process in Indonesia. This article argues that throughout those changes, radio has not only adapted to the new technological demands while at the same time transform the media by facing the new technological challenger and access to their audience. However, despite the adaptability of radio towards the digital era, this new media era has brought up the seemingly silencing process of minority voice by the majority. This could be concurred through concept

of spiral of silence. This article is a qualitative research that pays attention to several processes of adaptation and transformation that radio has gone through since the era of Reformasi in Indonesia.

Key Words: *Radio, technology, new media, journalism, traditional media, public opinion, spiral of silence*

DDC: 390.9

Ahmad Helmy Fuady

DIGITAL TECHNOLOGY AND ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology (ICT) through the digital revolution has raised optimism for economic development. However, it has also raised concerns about the increasing level of inequality because of capital and skill-biased technology. Automation arising from technological developments is also considered to decrease demand for labor. This paper aims to analyze the relationship between ICT development and economic inequality in Indonesia. It shows that ICT development in Indonesia is relatively poor and behind its neighbouring countries. There is also interregional inequality of ICT development in this country. Analysis of this paper shows that ICT development give more benefit to skilled labor and those in highest income group than to unskilled labor and those in lower income groups.

Keywords: *digital technology, inequality, disruption, ICT development index*

DDC: 302.2

Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto)**

BEYOND PROSUMPTION: PROSUMPTION PRACTICE OF CONTENT WRITERS IN NEWS AGGREGATOR PLATFORM UC NEWS

ABSTRACT

The emergence of Web 2.0 technology has made the internet users not only restricted by reading, browsing, and consuming the internet content. Nowadays the users can contribute actively as both consumer and producer at the same time (prosumer). One of the digital platforms that has become a trend in the present decade is news aggregator. This research will examine how the content writers in UC News, as one of the biggest news aggregator in Indonesia, do their production-consumption (prosumption) writing activity as a part of digital labor. The purpose of this research is to analyze the prosumption practices which are done by the UC News's content writers in relation to their position as digital labor. The methodology that is applied in this research is virtual ethnography to obtain the representation of digital culture mediated by the internet. The data are obtained from the answers of open-ended questions to 6 informants who are selected according to rate of activity in the platform, and the period of involvement as a content writer in UC News. In addition, the secondary data are collected from the writing contents which are produced by the informants. The findings of this research show that the content writers did their prosumption practices in a variety of ways, either through the information of writing (witness journalism), or through process the available information in the media as well as literatures that become the stuff of new writings. The researcher also found that the form of capitalism in prosumer era did not influence the content writers in doing production and consumption activity only but also distribution and marketization by the users.

Keywords: *content writers; news aggregator; prosumption; Web 2.0*

DDC: 305.4

Widjajanti M Santoso¹

PROBLEMATIC OF FEMININITY CONSTRUCTION IN VIRTUAL PUBLIC SPHERE

ABSTRACT

Femininity construction is very apparent in Indonesia's women's movement. It can discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the "Ibuisme" and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to

¹ Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group. Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing 'new' definition of women's participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women's movement that need to be reconsidered thoroughly.

Key words: *femininity, virtual public sphere, women's problem.*

Rosita Dewi

RINGKASAN DISERTASI

REKOGNISI ADAT DALAM PENGEMBANGAN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE DI PAPUA, INDONESIA

Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

ABSTRACT

The Indonesia government issued the special autonomy law for Papua for granting legal recognition of the Papuan to reduce conflict in Papua. This recognition was not, however, a satisfactory answer for the Papuans; there is a wide gap between the adat (customary) recognition by the Indonesian state and the recognition expected by the Papuans. I argued that the Indonesian government applies the corrupted recognition by hijacking adat recognition in Papua. This is clearly shown in the issue of adat lands in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project was developed. This research shows the form of corrupted recognition in Papua by the existence of Customary Community Council (new LMA) and participatory mapping in MIFEE. This research uses qualitative approach with ethnographic method consisted of participant observations, interviews, and literature studies.

Keywords: *recognition, adat, MIFEE, special autonomy law, Papua, customary community council, LMA, participatory mapping*

Fachri Aidulsyah

TINJAUAN BUKU

ISLAMISM AND THE POLITICS OF CITIZENSHIP IN INDONESIA

Judul Buku: Eric Hiarij And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

Widjajanti M Santoso¹

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)

Email: widjasantoso@gmail.com

ABSTRACT

Femininity construction is very apparent in Indonesia's women's movement. It can be discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the "Ibuisme" and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group. Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing 'new' definition of women's participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women's movement that need to be reconsidered thoroughly.

Key words: *femininity, virtual public sphere, women's problem.*

ABSTRAK

Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan "ibuisme" pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menghalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan "baru" terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.

Kata Kunci: *femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan*

¹ Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

PENDAHULUAN

Konstruksi femininitas memainkan peran besar pada status dan peran perempuan di Indonesia. Perempuan di Indonesia memiliki masalah representasi. Dalam kajian sejarah, gerakan perempuan kurang diangkat karena hanya sedikit sejarawan perempuan (Rahayu, 2007). Peran perempuan dalam sejarah atau dilihat dalam konteks gerakan, tidak banyak dibahas. Memang ada penulis asing yang memberikan porsi besar terhadap perkembangan gerakan perempuan di Indonesia, namun akademisi yang melihat kontribusi gerakan perempuan dari kacamata Indonesia hanyalah Yanti Muctar, dengan tulisannya yang berjudul *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru* (2016). Yang menyedihkan, buku yang berbasis tesis master ini diterbitkan setelah Yanti Muctar berpulang keharibaan-Nya.

Dalam diskusi tentang konstruksi gender, Ingraham (1994) memperlihatkan bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh konsep heteronormativitas. Menurut pandangannya, *“The heterosexual imaginary is that way of thinking which conceals the operation of heterosexuality in structuring gender and closes off any critical analysis of heterosexuality as an organizing institution”* (Ingraham, 1994, 203–204). Ingraham menunjukkan bahwa konstruksi gender tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi tentang jenis kelamin. Ingraham menyebut konsepnya sebagai *heterogender* yang melihat konsep gender melalui kritik terhadap sosiologi dari perspektif *feminist sociology*. Menurut pandangannya, *“... it seems to me that we need to question our assumptions about sex and gender and to how they organize difference, regulate investigation and preserve particular power relations, especially those linked to institutionalized heterosexuality”* (Ingraham, 1994, 214).

Feminist sociology mengkritik posisi keilmuan sosiologi yang melihat jenis kelamin sebagai variabel dan mengusulkan gender sebagai konstruksi sosial supaya dapat memproblematikkan gender sebagai subjek yang mandiri. Ingraham menekankan bahwa *feminist sociology* harus lebih mendalam lagi saat menganalisis posisi tersebut dan mengaitkannya dengan konsep heteronormativitas, yakni konsep yang

mengaitkan norma dan nilai hubungan sosial. Di sini konsep hetero melihat posisi laki-laki lebih tinggi dan dominan. Sejauh ini, heteronormativitas dilihat sebagai posisi yang *taken for granted*, tidak dipermasalahkan, dianggap normal, dan biasa saja. Dengan demikian, konstruksi yang terjadi terhadap gender bias heteronormativitas adalah bahwa gender laki-laki lebih penting dan lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Dengan menggunakan posisi ini dan melihat dalam konteks heterogender, analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan.

HETEROGENDER DI INDONESIA

Berdasarkan paparan teoretis tersebut, kita melihat bahwa imajinasi tentang gender dan proses konstruksi sosial merupakan dasar untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan kepemimpinan, terutama tentang femininitas. Femininitas adalah konsep untuk menunjukkan suatu konstruksi sosial yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan bentuk tentang keperempuanan. Tabel 1 memperlihatkan konstruksi sosial yang berkaitan dengan femininitas yang dapat dilihat dari perbedaan rezim yang ada di Indonesia (Qibtiyah, 2009). Qibtiyah (2009) melihat perbedaan orde sebagai konteks yang penting untuk melihat pengaruh konstruksi heterogender dalam kontinuitas, dan melihatnya sebagai sisi perbedaan organisasi perempuan.

Dengan demikian, *feminist sociology* dapat melihat femininitas dalam konteks kekuasaan dan kuasa. Analisis ini mengangkat perubahan konstruksi sosial tentang keperempuanan. Saraswati Sunindyo (1998) memberikan gambaran tentang perubahan konstruksi femininitas yang mendudukan perempuan sebagai anak. Melalui foto dan lagu, Saraswati Sunindyo memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam revolusi dimarginalkan dengan peran di garda belakang sebagai pendukung revolusi dari sisi domestik. Perubahan dari masyarakat masa revolusi menjadi masyarakat yang stabil, berdampak pada perubahan dalam memosisikan perempuan sehingga menariknya dari ruang publik untuk kembali ke ruang domestik.

Yulia Suryakusuma (1996) melihat peran perempuan masa Orde Baru dan menamakannya

sebagai ibuisme. Dalam program seperti ini, ibu memainkan peran yang besar (Suryakusuma, 1996; Santoso, 2013). Pada masa Orde Baru, terjadi proses penghancuran gerakan perempuan (Wieringa, 1999). Pengaruh terbesar dari penghancuran ini bukan sekadar hilangnya Gerwani sebagai salah satu bentuk kegiatan perempuan, tetapi juga hilangnya suatu ideologi. Terlepas dari keterkaitannya dengan PKI, Gerwani merupakan gerakan perempuan yang berawal dari ideologi.

Pengaruh ini sangat terasa ketika gerakan perempuan belajar bangkit pada 1980-an. Gerakan ini terbantu dengan adanya perkembangan dunia internasional yang menyadari bahwa posisi perempuan terbelakang. *First Conference on Women 1975* menjadi penting sebagai wahana perkembangan isu perempuan dan kemudian menjadi isu gender yang diakui sebagai kepedulian bersama (Santoso, 2016, 49).

Konsep femininitas dipergunakan oleh Carla Jones (2010), yang menceritakan bahwa pada masa setelah kemerdekaan, konstruksi femininitas Barat menjadi norma dan standar yang berkembang. Pada masa Orde Baru, konstruksinya berbasis kelas sosial priayi. Penekanan pada masa kini adalah *“The family principle wove the metaphor of the nation as a family into state programs for families, making domestic management central to a calm developing collectives”* (Jones, 2010, 275).

Secara individual, perempuan perlu percaya diri, hal ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan sekolah kepribadian. Pelatihan ini mampu memberikan standar perilaku yang perlu dikembangkan oleh perempuan supaya bisa beradaptasi dan tidak memalukan.

Perkembangan femininitas seperti ini disebut *state sponsored*. Perkembangan ini diobjektifikasi dan dinaturalisasi sebagai hal yang patut dilaksanakan oleh perempuan.

Perubahan terjadi setelah 1998 karena jatuhnya rezim Orde Baru. Namun, bangunan patriarkis yang menentukan perempuan tidak hilang sehingga menarik untuk diperhatikan. Dalam hal ini, kelompok kelas menengah perempuan merupakan ujung tombaknya. Pertanyaan Jones adalah *“...how much work— it takes to create the illusion of the natural can we see the alternatives that have been silenced in the process”* (Jones, 2010, 279). Tabel 1 menggambarkan konstruksi perempuan di Indonesia.

Tabel 1 memperlihatkan adanya perubahan dalam konstruksi sosial tentang perempuan. Pada masa awal berdirinya Indonesia, perempuan merupakan partner laki-laki dalam perjuangan. Posisi yang signifikan ini kemudian berubah, dan menurut paparan Saskia Wieringa (1999), terjadi penghancuran gerakan perempuan secara ideologis dengan mengaitkan Gerwani dengan isu komunisme di Indonesia. Selain itu, tokoh perempuan, misalnya Kartini, direduksi sebagai *performance* saat memperingati hari kelahirannya dan tidak menggarap isu-isu penting yang diperjuangkannya atau yang diperjuangkan oleh perempuan. Akhirnya, Orde Baru mengembangkan posisi perempuan di dalam keluarga yang lebih submisif dengan menekankan peran ibuisme. Dalam konstruksi ini, perempuan mendukung aktivitas militer sehingga ibu-ibu dari kalangan militer bergerak sesuai dengan program negara (Sunindyo, 1998).

Tabel 1. Konstruksi Sosial tentang Perempuan Antar-Orde

	Orde Lama	Orde Baru	Orde Reformasi
Konstruksi Perempuan	Perempuan adalah anak revolusi.	Penghancuran ideologi gerakan perempuan.	Perempuan “jahat,” Perda “anti-perempuan.”
Tokoh perempuan	Sarinah sebagai tokoh perempuan ruang domestik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritual hari Kartini. • Ibuisme. • PKK. 	TKW/TKI bermasalah.
	Herlina sebagai tokoh perempuan anak revolusi.	Konstruksi perempuan bagian dari militer.	<ul style="list-style-type: none"> • Poligami. • Kawin di bawah umur.
Konstruksi alternatif		Konstruksi perempuan alternatif “Marsinah.”	Susi Pudjiastuti sebagai toko <i>wonder women</i> .

Sumber: Kompilasi penulis dari berbagai bahan, perbaikan dari April 2018

Dalam perjalanan Orde Baru, kasus Marsinah mencuri perhatian dunia. Marsinah adalah tokoh perempuan biasa dan ia adalah buruh yang harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan hak-haknya. Kasus Marsinah pun memperlihatkan pengaruh militer dalam penanganannya.

Pada masa Orde Reformasi di bawah Presiden Jokowi, Susi Pudjiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan. Dalam gambar yang beredar di internet, dia adalah representasi dari *the wonder women* di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan lukisan wajah Susi lengkap dengan atribut yang biasa dipakai pahlawan super, Wonder Woman. Susi muncul sebagai perempuan dengan feminitas yang kompleks, yaitu bertato, bergaya tidak protokoler, dan gemar mengenakan sepatu kets. Dalam pekerjaan, dia berani mengambil keputusan dan melaksanakan penenggelaman kapal. Dalam relasinya dengan laki-laki, dia berani bersaing dan tidak gentar menunjukkan jati dirinya, misalnya dalam olahraga air. Namun, dia juga bisa muncul sebagai perempuan cantik dan menarik.



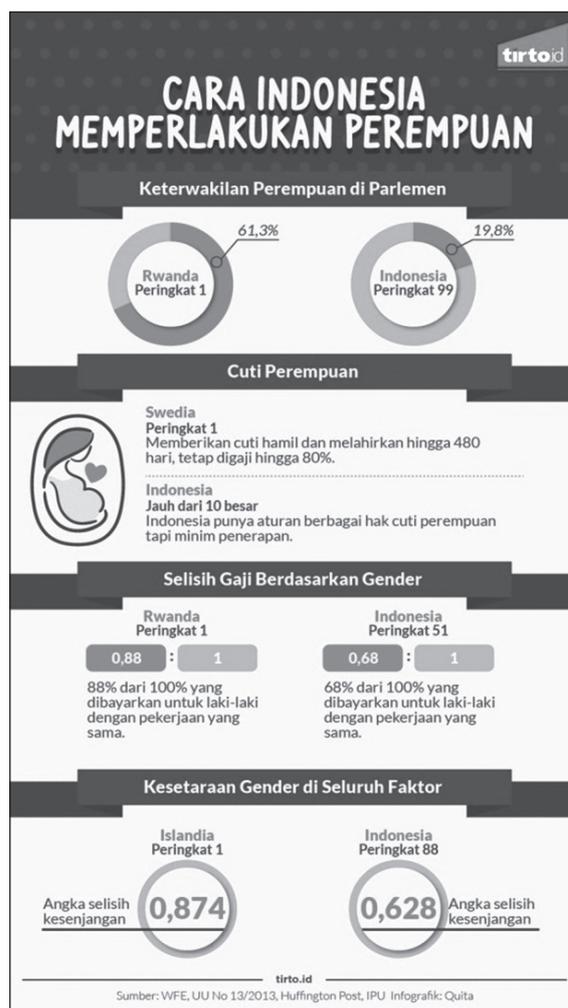
Sumber: Indonesia Imaji (2018).

Gambar 1. Menteri Susi sebagai Wonder Woman

Konstruksi perempuan pada masa Orde Reformasi memang membingungkan karena terdapat kasus ulama yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pada saat perkawinan anak masih menjadi masalah, muncul juga persoalan tentang perempuan pada kasus buruh migran, yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap mereka. Masalah perempuan menjadi hal yang paradoks karena saat semua lini bergerak menyongsong kebebasan setelah masa pemerintahan otoriter Orde Baru, perempuan

menghadapi serangkaian Perda yang melihat perempuan tidak layak berada di ruang publik, misalnya peraturan tidak boleh keluar malam. Sebagai ilustrasi, Perda Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran (untuk mudahnya akan disebut Perda Anti-pelacuran) yang berdampak pada stigmatisasi perempuan keluar malam. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan adanya 207 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan (Wisnubrata, 2012). Keberadaan Perda semacam ini tidak melihat konteks situasi masyarakat masa kini dan hanya bersandar pada pandangan heteronormativitas tentang perempuan yang tidak sesuai dengan realitasnya.

Pandangan tentang perempuan Indonesia yang beredar di media sosial diwakili oleh gambar 2. Gambar ini menggambarkan posisi perempuan dari sisi keterwakilannya di parlemen



Sumber: Quita dari Tirto.id (2017)

Gambar 2. Perempuan Indonesia dalam Infografis

yang kurang kondusif, masalah pekerjaan yang diwakili oleh aturan tentang cuti, dan penghasilan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Secara nasional, indeks kesetaraan gender di Indonesia juga kurang mencerminkan situasi yang menggembirakan.

Karakter Gerakan Perempuan di Indonesia

Menurut Larasati (2013), perspektif *herstory* harus dikembangkan oleh perempuan melalui pengalaman dan ketubuhannya. Pengalaman perempuan dan sejarah perempuan adalah sesuatu yang harus ditulis sendiri oleh perempuan karena memiliki *standpoint* yang berbeda dari penulisan sejarah pada umumnya. Tanpa usaha penulisan *herstory*, yang terjadi adalah isu *invisibility* perempuan sebagai sumber pengalaman dan perjuangan. Pendekatan yang diangkat oleh Larasati merupakan upaya dekonstruksi pendekatan yang umum. Larasati mengambil contoh kasus Inong Aceh untuk menunjukkan adanya *invisibility* dan melalui kegiatan, mereka mengangkat *invisibility* sebagai upaya penting bagi penteorian perempuan. Jika ini diterima, pengetahuan yang sebelumnya *invisible* dapat diangkat menjadi pengetahuan yang penting.

Menurut Affiah (2014), tantangan gerakan perempuan ada baik secara internal maupun eksternal seperti tertera pada tabel 2.

Namun, terdapat beberapa capaian perempuan dan kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Pendidikan pemilih bagi perempuan;
- 3) Mendorong perempuan untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan dengan mendorong isu kepemimpinan politik perempuan;
- 4) Pemberdayaan perempuan di pedesaan;
- 5) Mendorong akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan;
- 6) Penguatan ekonomi perempuan dalam bentuk koperasi, terutama bagi perempuan pekerja migran dan perempuan eks-prostitusi;
- 5) Mendorong kebijakan pemerintah untuk memiliki anggaran yang memperhatikan keadilan gender (Affiah, 2014).

Qibtiyah (2009) menganalisis organisasi yang berkaitan dengan isu keagamaan dan dikaitkan dengan karakter lain, seperti ciri sekuler dan nasionalis, sampai pada kesimpulan dari karakter gerakan perempuan. Analisisnya sebagai berikut.

1. Gerakan perempuan yang memang muncul dalam dinamikanya dengan organisasi, yang pada umumnya dibentuk oleh para laki-laki.
2. Gerakan perempuan adalah sebagai pendukung, bukan menggarap kepemimpinan gender.

Karakter ini memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap isu makro tentang masyarakat lebih kentara dibandingkan dengan diskusi filsafati tentang perempuan dan gerakannya, atau kepentingan gender perempuan.

Tabel. 2 Tantangan Gerakan Perempuan

Internal	Eksternal
Kemandirian ekonomi kurang dan kesukarelaan lemah.	Keuangan tergantung lembaga donor.
Kaderisasi lemah.	Aparat dan penegak hukum tidak sadar tentang masalah perempuan.
Terdapat banyak faksi sehingga kurang fokus pada aksi dan refleksi terhadap gerakan yang melemahkan gerakan perempuan.	Kekerasan tidak diangkat pada taraf kasus hukum.
Terfokus pada program dan masing-masing kurang berkoordinasi dengan organisasi lainnya.	Kebijakan yang tidak melindungi perempuan “... hingga tahun 2013 berjumlah 342 dengan lebih dari 200 kebijakan berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perempuan.”
	Kebijakan pemerintah pro pasar yang tidak ramah terhadap perempuan.
	Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dan organisasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung poligami.

Sumber:???

Pengalaman masa lalu berkaitan dengan masa kini dan pertanyaan tentang gerakan perempuan untuk masa depan, maka kita bisa melihat bahwa ketiga hal tersebut masih berpengaruh hingga saat ini. Konstruksi sosial tentang gender berperan dalam pengembangan gerakan perempuan dan pertautannya dengan masalah kesejarahan cukup jelas. Konstruksi perempuan berbeda-beda penekanannya, tergantung rezim yang berkuasa. Namun, ada organisasi perempuan yang sejak awal sudah sadar akan adanya perbedaan perspektif dan bergerak berdasarkan ideologi untuk membantu perempuan. Kepentingan perempuan tersegregasi dengan kepentingan lain karena signifikansi kajian perempuan termarginalkan. Dengan demikian, gerakan perempuan perlu memahami tantangan ini dan bergerak bersama menciptakan konstruksi tandingan. Selain itu, masyarakat membutuhkan diskusi tentang hal ini untuk menghindari diri dari konstruksi yang diarahkan oleh kelompok seperti HTI.

IMAJINASI TENTANG PEREMPUAN: BERUBAHKAH?

Bagian ini menangkap beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa konstruksi heterogender berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apakah imajinasi tentang perempuan itu berubah. Beberapa orang telah mencoba menggambarannya melalui film. Sutradara Lucky Suwandi membuat daur ulang film *Gita Cinta dari SMA* (film yang dibintangi Rano Karno dan Yessi Gusman pada 1979) setelah 38 tahun. Film daur ulang yang dirilis 9 Maret tahun? ini menunjukkan:

Secara kasat mata, polemik-polemiknya memang berbeda. Galih dan Ratna, (gadis) milenial (ini) tak lagi ditentang orangtua karena masalah beda suku, tapi perkara idealisme yang diserempetkan sedikit dengan masalah kaya-miskin. Galih anak tukang katering yang sekolahnya saja mesti dibiayai beasiswa. Sementara, seperti deskripsi pembuka, Ratna adalah keturunan pebisnis kaya. Namun, kalau dilihat lebih cermat, sebenarnya masalah hidup pasangan ikonik Indonesia ini tak berubah-ubah amat (sumber?).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa yang dibahas adalah situasi sosial tentang konstruksi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak

berbeda. Penulis resensi ini sebenarnya memperlihatkan bahwa kurang ada isu-isu baru yang muncul dari situasi sosial yang ada. Yang terjadi adalah serangkaian pelatihan untuk menjadi perempuan yang ideal, seperti diimajinasikan melalui poster tentang domestikasi perempuan pada Gambar 3. Poster yang diperoleh dari grup dalam aplikasi pesan singkat Whatsapp ini berisi imajinasi perempuan ideal dan dukungan mekanisme dalam masyarakat. Kegiatan yang diiklankan dalam poster ini menekankan pada peran baku perempuan dalam perkawinan dan tidak memasukkan isu-isu perempuan, seperti kesetaraan.



Sumber: WA group

Gambar 3. Domestikasi Perempuan

Imajinasi tentang perempuan juga dikembangkan di media sosial, seperti dipaparkan pada tabel 3. Felix Siauw² dipilih berdasarkan tampilannya di grup *Whatsapp*, yang menjadi

² Felix Siauw adalah ustaz muda, mualaf, dan anggota HTI. Akun Instagramnya per 12 April tahun? memiliki 1,9 juta pengikut. Hew (2018) memperlihatkan irisan dakwah dan kegiatannya dengan HTI. Dakwahnya ditujukan bagi anak muda yang kurang terekspose ajaran keagamaan tipe pesantren. Dia menerbitkan banyak buku dan berkegiatan bersama dengan ustaz lain dengan aliran yang berbeda. Banyak orang kurang memahami keterkaitannya dengan HTI, seperti pada postingan ini terdapat fotonya saat berdakwah di Baitul Ihsan, mesjid yang

salah satu ruang publik modern dan dipergunakan untuk mengemukakan pandangan dan pikirannya. Pemikiran yang dikembangkan Felix Siauw merupakan imajinasi tentang perempuan yang berkembang dari sisi kelompok sosial yang berbeda pandangan dengan mereka yang mengembangkan pemikiran kesetaraan gender. Postingan di grup Whatsapp kemudian dikelompokkan dalam empat tema besar, yaitu kaitan pandangannya terhadap keberagaman, pemaknaan kesetaraan gender, kaitannya dengan isme atau aliran, dan kaitannya dengan institusi. Keempat pandangan ini merupakan hasil pembacaan terhadap postingan yang dilontarkan untuk menanggapi isu kesetaraan gender melalui RUU Kesetaraan Gender yang sedang didiskusikan di masyarakat. RUU mengkritik tradisi islami yang berkaitan dengan poligami, kekerasan terhadap perempuan, waris perempuan yang mendapatkan lebih sedikit dibanding laki-laki, serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Tabel 3 memperlihatkan beberapa hal penting yang membuat pandangan Felix Siauw tidak sejalan dengan pemahaman kesetaraan gender. Secara umum, kesetaraan gender dipahami sebagai pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun dalam penjelasannya terdapat dasar pemaknaan yang berbeda. Dasar utamanya adalah kenyataan sejarah bahwa adanya Islam merupakan mekanisme menolong perempuan, yang tentunya didukung oleh Alquran dan Hadis. Isu yang diangkat adalah kritiknya terhadap pandangan bahwa agama merupakan institusi yang mengekalkan pandangan peran tradisional perempuan. Dalam pandangan Felix Siauw, Islam memerdekakan perempuan dan mengangkatnya menjadi mulia. Dalam Islam, peran laki-laki dan perempuan sudah terjabarkan, dan mengikuti pilahan publik dan privat. Lelaki juga diposisikan sebagai pemimpin perempuan untuk mendapatkan surga. Laki-laki boleh memukul perempuan dengan syarat dan ketentuan yang tidak membahayakan perempuan. Posisi laki-laki dan perempuan adalah komplementer terhadap sesama karena saling menolong dan memiliki fungsi berbeda, seperti yang dianalogikan dengan saf laki-laki di depan dan saf perempuan di belakang. Yang menyamakan laki-laki dan

terletak di kantor pusat Bank Indonesia pada September 2016.

perempuan adalah rido untuk mendapatkan kebahagiaan, yang ukurannya adalah bukan materi. Berdasarkan pandangan tersebut, Indonesia tidak memerlukan pemikiran kesetaraan gender, bahkan kesetaraan gender dianggap sebagai upaya yang merusak tatanan yang ada dan menghasilkan tingkat perceraian yang tinggi.

Felix Siauw mengatakan bahwa sumber pemahaman gender berasal dari cara pikir Yunani dan Romawi, kemudian berkaitan dengan tradisi kristiani. Selain itu, ketertindasan perempuan terlihat sejak *dark ages* di Eropa. Dalam konteks kesetaraan gender, proses tersebut membawa Indonesia ke arah kehancuran, sekularisasi, dan membawa Indonesia ke arah kapitalisme Barat. Pandangan tentang perempuan sebagai dosa asal dan pembawa kegetiran terlihat dalam pemaknaan tentang *witches* yang berbeda dengan *wizard* dan *magician* yang tidak berkonotasi negatif. Pada masa tersebut, perempuan tidak boleh mencari ilmu dan ahli kimia perempuan diperlakukan seperti *witches*, kemudian dihakimi dengan cara dibakar. Perempuan dijadikan objek dapat dilihat dari patung dan lukisan yang telanjang atau tidak berbalut pakaian.

Menurut Felix Siauw, Barat secara umum dan Amerika khususnya, merupakan sumber dari pemaknaan yang buruk dengan menggunakan konsep *taghut*. Dalam pandangan tersebut diperlihatkan cara pemaknaan islami yang bertolak belakang dengan pandangan kapitalis dan liberalis yang ada di balik pandangan tentang gender. Felix Siauw juga memperlihatkan kaitannya dengan pandangan HTI, misalnya pemerintahan khalifah disebutkan memuliakan perempuan.

Berdasarkan pandangan ini, kesetaraan gender didukung oleh pemikiran liberalisme. Pemikiran tersebut dapat dilihat dari beberapa hal penting. Pertama, referensi terhadap Barat dengan ideologi yang dianggap merusak Islam, yaitu demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Kedua, adanya pendukung berupa lembaga donor FF, USAID, dan AUSAID. Pendukung lainnya adalah lembaga di Indonesia, seperti JIL, dan beberapa tokoh, seperti Musdah Mulia, yang mempertanyakan norma Islami tentang waris dan perkawinan melalui *counter legal draft* terhadap UU Perkawinan 1974 (Wahid, 2014), serta gerakan seperti Fikih Lintas Agama (FLA).

Tabel 3. Antitesis terhadap Diskursus Dominan dari Felix Siauw →isi tabel dgn bhs formal

Berkaian dengan keagamaan	Kesetaraan gender	Isme	Lembaga, negara
Alquran dan syariat Islam adalah sumber bias gender (perlakuan tak setara terhadap perempuan).	RUU KKG.	Liberalisme.	Ford Foundation, USAID, AUSAID.
Islam datang, perempuan jauh dimuliakan dibanding hidupnya pada masa yang lalu, dan diangkat derajatnya.	menyamakan hak dan kewajiban antara lelaki dan wanita, membuat semua sama antara lelaki dan wanita.	liberalis mencoba meliberalkan perempuan dari hukum Allah, mensekulerisasi perempuan Muslim, atas nama gender.	JIL, Musdah Mulia, dalam FLA (fikih lintas agama) yang mengusulkan kesetaraan dalam agama Islam.
Islam memandang pria dan wanita berbeda secara jender, namun mendapatkan akses yang sama terhadap kebahagiaan, yaitu rido Allah Swt.	<ul style="list-style-type: none"> • menggugat hak bagi waris lelaki yang dua kali lipat wanita, talak yang ada di tangan lelaki, dan poligami • warisan laki-laki lebih banyak karena harta itu dipakai untuk kepentingan keluarganya, sedangkan warisan bagian wanita untuknya semata. Adil, kan? 	wanita-wanita Barat kapitalis.	<p>Mengapa hanya laki-laki yang boleh boleh?</p> <p>Memangnya perempuan mau punya dikelilingi banyak laki-laki? Fitrahnya tidak seperti itu (memangnya saya wanita apaan)</p>
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain (QS9:71).	<p>menggugat kiprah politik perempuan, bolehnya memukul istri dalam syariat Islam, dan mengusulkan aturan-aturan itu dicabut</p> <p>Pemukulan terhadap wanita bukan untuk kekerasan, tapi untuk <i>ta'dib</i> (mendidik) dan pukulan itu juga ada etikanya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bila istri maksiat dan sudah dinasehati, sudah didiamkan, sudah dipisah ranjang, tetapi istri tidak tobat (?) • Pemukulan tidak boleh di kepala, tidak boleh berbekas, dan tidak boleh menyakitkan (?) 	<ul style="list-style-type: none"> • sejarah kemunculan isu feminisme / kesetaraan gender, supaya jelas bagi kita sikapi • <i>dark ages</i> di Eropa, abad pertengahan, yaitu 5–15 M 	tak ada negara yang menerapkan kesetaraan gender lalu benar. Yang ada, tatanan hidupnya rusak. Lihat saja AS, bosnya feminis.
Dalam Islam, perempuan bisa sama bahagia dengan laki-laki, tak perlu isu kesetaraan gender yang menyesatkan.	Laki-laki boleh kerja maka wanita juga, laki-laki boleh berpolitik maka wanita juga, laki-laki boleh senang-senang bercinta, wanita juga. Begitulah isu kesetaraan gender.	Gereja menjadi badan terkuat setelah <i>landlord</i> , agama Katolik menjadi agama negara, dan aturan gereja adalah mutlak.	Sekulerisasi barat yang akhirnya menjadikan standar kebahagiaan terletak pada harta, jabatan, dan kenikmatan dunia.

Berkaitan dengan keagamaan	Kesetaraan gender	Isme	Lembaga, negara
Lelaki berlomba saf paling depan, perempuan berlomba saf di belakang, keduanya mendapat rido Allah dan jalur masing-masing sudah tetap.	Gender setara? Rusaklah tatanan hidup, angka perceraian meningkat, dan AS kampiun dalam hal perceraian dan angka <i>single parent</i> yang meroket.	Menganggap gender wanita sebagai aib yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga, <i>container of satan</i> .	Lahirilah gerakan feminisme di Barat, sekali lagi, lahirilah feminisme di dunia barat karena mereka merasa diperlakukan tidak adil.
Sistem taghut mengganti aturan Allah dengan aturan manusia dan kesetaraan gender yang hasilnya malah merusak tatanan hidup.	Gender setara? Anak <i>broken home</i> menjamur, <i>incest</i> (seks antarkeluarga) bermunculan, depresi dan stres perempuan meningkat.	Gender wanita diperlakukan berbeda, masyarakat mengadopsi anggapan Katolik, lalu menganggap wanita sebagai warga kelas dua, di bawah laki-laki.	Kapitalis liberal mengukur kecantikan dari lekuk tubuh, sementara Islam mengukur lewat ketakwaan dan amal ibadahnya.
Islam memerintahkan wanita menutup aurat dan tak banyak menampakkan dirinya karena yang berharga memang harus dilindungi dan dijaga.	Kesetaraan gender menyamakan antara lelaki dan wanita padahal keduanya berbeda dan punya jalur masing-masing.	Dalam sejarah Yunani, Romawi, kemudian Kristen Katolik, wanita tak berhenti dianggap sebagai bawahan pria (subordinat).	Gender laki-laki dan gender wanita seharusnya punya akses yang sama terhadap harta, kerja, dan semua kebebasan lainnya.
Islam menggariskan aktivitas wanita bersama-sama dengan jamaah wanita karena Islam menghormati wanita dan wanita tak dikumpulkan dengan pria.	Cacatnya kapitalis adalah menganggap pria dan wanita sama, padahal sudah jelas-jelas tak bisa disamakan secara gender.	Gender wanita dieksploitasi secara seksual di patung-patung, lukisan-lukisan, dan menjadi objek nafsu pria.	
Islam menaruh posisi ibu tiga kali lipat lebih dari posisi ayah, siapa yang harus ditaati ya Rasul? "ibumu!" "ibumu!" "ibumu!" "lalu ayahmu!"	Kapitalis menjadikan standar kebahagiaan ada pada materi, dan hal ini tidak menguntungkan bagi gender wanita.	Gender wanita dianggap beban karena tak mampu mencari nafkah, dikuasai laki-laki, dan boleh diperlakukan semena-mena.	
Rasul mengatakan, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan wanita <i>shalihah</i> " (HR Muslim).	Kaum liberalis kapitalis, merusak tatanan masyarakat hingga mereka mengambil keuntungan dan menjauhkan Islam.	di Eropa, penyihir wanita dinamai <i>witches</i> , makna konotatif yang kasar dibanding <i>wizard</i> atau <i>magician</i> yang merupakan penyihir laki-laki	
Rasul mengucapkan, "Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya" (HR Ahmad).	Gender ini berasal dari tatanan hidup Barat sekuler, dan sama sekali bukan berasal dari Islam.	Wanita tak diperbolehkan belajar, ahli-ahli kimia wanita dianugerahi gelar <i>witches</i> dan dihukum bakar.	
Pendukung pertama Rasul adalah wanita, <i>syahidah</i> pertama juga wanita, dan Rasul juga wafat dalam pelukan wanita.	Lelaki berlomba syahid di medan jihad, perempuan berumrah pun mendapat pahala yang sama. jalurnya sudah ada, tak perlu disetarakan jender	Gender wanita betul-betul menderita, dosa sejak lahir, karena Kristen menganggap merekalah sebab keluar dari surga.	

Berkaian dengan keagamaan	Kesetaraan gender	Isme	Lembaga, negara
Harkat dan martabat wanita diangkat Islam dengan penerapan syariat Islam. Dalam masa Khilafah Islam, kedudukan wanita mulia.	Lelaki mencari nafkah untuk keluarga, perempuan mengurus rumah dan keluarganya, semua dapat rido. Tak perlu berlomba di jalur yang sama.		
	Bila ingin disetarakan gender, hasilnya jadi hancur. Pria cari nafkah dengan angkat-angkat barang, lantas apakah perempuan bisa menyamai? Tidak.		
	Laki-laki bisa menyamai wanita? Tidak. Laki-laki memimpin kaumnya. Bila wanita yang memimpin, bisa stres dia.		
	Tak perlu kesetaraan gender karena Allah yang lebih tahu tentang jalur perlombaan kebaikan bagi wanita dan pria, bukan manusia yang mengetahui.		
	Suami adalah pemimpin istri. Dia disertai wewenang oleh Allah agar menuntun istri ke surga Allah dan menjaganya dari maksiat.		

Sumber: Diolah penulis dari berita yang beredar di WA grup April 2018 (tulisan diambil sesuai dengan berita di WA group dengan perubahan seperlunya).

Pandangan tersebut memperlihatkan pemaknaan yang beredar di ruang maya dan ruang publik di Indonesia. Paparan ini merupakan gambaran antitesis terhadap diskursus dominan yang beredar dan isinya sangat berbeda dengan kenyataan yang berhubungan dengan masalah sosial, khususnya terkait dengan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan bagian dari pertempuran diskursus yang terjadi di masyarakat, yang memengaruhi konstruksi tentang gender yang dikembangkan. Para pendukung gender menghadapi banyak hal, misalnya lambatnya masyarakat dan birokrasi melihat pentingnya gender dan konstruksi gender yang berbeda dengan yang saat ini dikembangkan di masyarakat. Dalam konstruksi tersebut, ada kepentingan politik yang dibalut dalih keagamaan. Adanya HTI dibalik pemaknaan ini merupakan pandangan yang dilihat sebagai antitesis terhadap pemaknaan yang ada.

KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN PEREMPUAN

Pada tingkat kebijakan, terlihat lemahnya representasi perempuan. Lembaga utama yang menjaga isu-isu perempuan adalah Komnas Perempuan (Santoso, 2015). Sementara itu, NGO perempuan yang mengembangkan isu-isu perempuan pada masa Orde Baru kini seperti kehilangan gaungnya. Organisasi pada masa Orde Baru yang masih ada hingga saat ini contohnya Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, dan PEKKA. Hal ini sangat terlihat karena lingkup jejaring dan berita kegiatan organisasi-organisasi ini menjadi terbatas. Selain karena terbatasnya *expose* terhadap media massa, hal ini juga terjadi karena berkembangnya media sosial membuat pemberitaan terpecah dan kurang terpapar pada masyarakat umum. Kajian P2KK LIPI tentang

hak asasi manusia yang dilihat dari problematika RUU KKG, kasus UU Pornografi, kepemilikan perempuan, perempuan di birokrasi dan di dalam konflik sosial, memperlihatkan bahwa isu perempuan tidak dianggap penting. Selain itu, isu perempuan juga dilihat sebagai sesuatu yang kontroversial dan seolah-olah tidak penting untuk dibahas.

Di Indonesia pada 2013, target MDG's tidak berhasil dan bahkan kematian ibu dan anak meningkat (Komnas Perempuan, 2013; Santoso, 2016). Gerakan perempuan menyediakan kebutuhan bagi perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa pada tingkat kelembagaan formal, perempuan belum menjadi pertimbangan yang penting. Namun, dari sisi kepemimpinan, terlihat bahwa kegiatan gerakan perempuan menjadi tempat yang kondusif bagi pengembangan kepemimpinan perempuan.

Ada buku sebagai refleksi dari dominasi heterogender yang berkembang di Indonesia, misalnya *Seksualitas di Indonesia, Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman dan Representasi* (2018). Dalam konteks perkembangan ilmu, terlihat adanya kelemahan karena representasi keilmuan yang diwakili oleh Kajian Gender UI terlihat sulit berkembang karena aturan yang tidak kondusif. Jadi, meskipun memiliki keterwakilan melalui KPPPA, pada kenyataannya, kepentingan perempuan di Indonesia masih rentan.

Berikut ini ilustrasi tentang kebutuhan dan kepentingan perempuan yang kurang terprentasikan. Dalam tulisan tentang PUG, ada beberapa agenda yang dibicarakan (Santoso, Djohan, 2016):

1. Konstruksi simbol dan citra tentang gender sudah ada dalam bentuk peraturan perangutanamaan gender.
2. Sistem sosial yang ada masih melihat bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang netral gender. Aturan yang ada belum membedakan dan memasukkan elemen gender. Lebih buruk lagi, gender belum dianggap penting dalam organisasi. Hal ini diperlihatkan oleh lemahnya dukungan terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan Kajian Gender dan PSW secara keilmuan.

3. Organisasi yang bergerak pada isu perempuan sudah ada di masyarakat, namun yang bergerak pada isu akademis baru muncul melalui kegiatan seperti Pelita Ilmu. Dalam organisasi, dibutuhkan komponen yang sensitif gender berupa individu yang peduli dan melakukan pemberdayaan berdasarkan kebutuhan gender.
4. Organisasi perlu memperhatikan supaya gender masuk dalam proses organisasi. Hal ini merupakan sebuah isu yang perlu diangkat di masyarakat.

Laporan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan SDG's (2016) mengamanatkan bahwa implementasi SDGs di Indonesia yang memasukkan:

1. Pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dalam implementasi SDGs;
2. Penguatan koordinasi antara kementerian/ lembaga dalam implementasi SDGs;
3. Pelibatan lembaga HAM Nasional (Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI) dalam koordinasi pelaksanaan SDGs;
4. Pelibatan CSO perempuan dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan SDGs.

Dalam amanat tersebut, Komnas Perempuan mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kemenko PMK mengoordinasikan indikator gender di tingkat K/L dan memperhatikan target yang tegas, misalnya menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Amanat seperti ini memperlihatkan kecenderungan bahwa acara atau kebutuhan tentang perempuan dilakukan oleh perempuan. Dalam proses ini, mereka yang diberikan mandat biasanya adalah perempuan. Pola dan proses seperti ini memperlihatkan bahwa lingkup pelatihan perempuan di birokrasi masih terbatas pada pola ghettoisasi, yakni dari perempuan untuk perempuan.

Belum tuntas masalah perkawinan anak yang dibahas sejak Konferensi Perempuan Indonesia I tahun 1928, sekarang terdapat pernyataan sikap yang muncul karena abainya masyarakat

terhadap isu ini dari BERAGAM. Berikut ini pernyataan “Indonesia BERAGAM Menuntut Setop Perkawinan Anak.” Tuntutan dilakukan pada:

1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan komitmen politik dengan mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang merevisi UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segera mengesahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerbitkan Keputusan Menteri tentang gerakan nasional penghentian perkawinan anak sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu;
4. Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan kebijakan penghapusan perkawinan anak, melakukan penyadaran melalui kursus pra-nikah dan memastikan petugas KUA dan institusi di bawah naungannya tidak melegitimasi praktik perkawinan anak;
5. Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk memastikan wajib belajar 12 tahun dijalankan di seluruh wilayah dan mengintegrasikan Kespro dan Seksualitas dalam proses pendidikan formal maupun pendidikan kemasyarakatan;
6. Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia supaya menjalankan rekomendasi Komite CEDAW PBB untuk merevisi UU Perkawinan No 1. Tahun 1974 tentang penentuan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 18 tahun;
7. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang menjadi dampak dari perkawinan anak terutama Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam negeri dan migran dengan meratifikasi Konvensi ILO 189, percepatan revisi Undang-Undang 39 No. 39/2004 yang berpihak pada buruh migran dan anggota keluarga serta mengajukan inisiatif RUU Perlindungan PRT;

8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meninjau dan membatalkan aturan-aturan diskriminatif pada perempuan dan minoritas yang selama ini menjadi penghambat proses penyadaran hak-hak perempuan;
9. Bappenas untuk memastikan pencapaian SDGs khususnya tujuan 5 untuk mengakhiri perkawinan anak;
10. Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data terpilah perkawinan anak usia di bawah 18 tahun;
11. Masyarakat sipil untuk memberikan perhatian terhadap masalah perkawinan anak, mengorganisasi diri menjadi kelompok penekan dan pengontrol pencegahan perkawinan anak;

Dari sebelas butir pernyataan tersebut, perhatian terhadap butir 11 memperlihatkan bahwa pelatihan kepemimpinan perempuan berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Dengan demikian, melalui kegiatan masyarakat sipil, perempuan mendapatkan kesempatan untuk melatih potensi kepemimpinannya. Isu yang diangkat seputar masalah perkawinan, hak pekerjaan bagi perempuan, dan diskriminasi kelompok minoritas. Jika dikaitkan dengan situasi perempuan berdasarkan paparan sejarah, masalah perempuan tidak bergerak jauh dari masalah yang mereka bahas pada 1928 sehingga cukup relevan untuk mempertanyakan posisi perempuan pada masa kini.

PENUTUP

Diskusi tentang heterogender memberikan wawasan bahwa konstruksi femininitas yang berkembang dipengaruhi oleh pandangan heteronormativitas dan seksualitas pun memainkan peran. Dalam konstruksi tersebut, femininitas yang berkembang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berkaitan dengan konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, heteronormativitas dianggap sebagai nilai yang normal dan tidak dipertanyakan kembali. Oleh karena itu, dalam analisis gender sering kali terdapat situasi yang terasa kurang mendalam. Kasus yang terjadi di Indonesia, kebebasan yang terjadi sebagai efek dari Reformasi 1998 menghasilkan serangkaian Perda tidak ramah perempuan. Perkembangan ini

menjadi paradoks karena ketika semua bergerak untuk memaknai kebebasan, perempuan justru ditarik kembali pada peran-peran tradisional.

Di satu pihak, perkembangan sosial politik membutuhkan sosok pemimpin sehingga yang dilakukan lebih pada mengaitkan kepemimpinan dengan konstruksi heterogender dibanding mengindahkan potensi perempuan. Di pihak lain, perkembangan perempuan berhadapan dengan perkembangan konstruksi femininitas feminin yang mendudukkan ruang privat sebagai laman dari perempuan. Konstruksi ini berjalan bersamaan dengan perkembangan Islamisasi yang direpresentasikan oleh pandangan Felix Siauw yang populer di kalangan muda. Perkembangan yang serupa juga terjadi di kalangan perempuan dewasa yang melakukan beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi perempuan di ruang publik menjadi bunda. Konstruksi seperti ini bukan sesuatu yang unik, karena pada masa Orde Baru, konstruksi ibuisme dilakukan negara melalui organisasi perempuan, seperti Darma Wanita. Perbedaannya adalah pada masa Orde Baru, negara memainkan peran besar dalam proses tersebut, sekarang hal tersebut dilaksanakan sendiri oleh masyarakat sipil yang melihat kepentingan tentang konstruksi perempuan dengan keluarga sebagai tolok ukurnya.

Konstruksi perempuan yang berdasar pada kepentingan perempuan dijaga oleh serangkaian institusi, seperti Komnas Perempuan, Jurnal Perempuan, NGO Perempuan, Kajian Jender, dan KPPPA. Upaya institusi ini menjaga kepentingan perempuan dilakukan melalui usulan RUU KKG yang menghasilkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dasar yang dipergunakan untuk melihat posisi kesetaraan gender berbeda dengan kesetaraan gender yang diusung oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan juga mengalami kesulitan karena selain isu yang diusung berbeda-beda, gerakan ini pun mengalami masalah kesenjangan jaringan. Selain itu, kegiatan gerakan perempuan merupakan kegiatan “ghettoisasi” di mana kegiatan perempuan dilakukan dan ditujukan dan oleh perempuan. Kegiatan ini menghasilkan urusan perempuan hanya dipantau atau diinisiasi oleh perempuan dan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan jaringan.

Pandangan seperti Felix Siauw menjadi lebih populer di kalangan orang muda. Hal ini belum disadari oleh gerakan perempuan karena gerakan perempuan terpaksa terfokus pada kepentingan perempuan. Dengan demikian, terjadi kontestasi antara diskursus kepentingan perempuan yang perlu menghadapi konstruksi sosial seperti pemahaman Felix Siauw, dengan pandangan yang dikemukakan oleh gerakan perempuan. Masyarakat tidak memahami posisi Felix Siauw sebagai anggota HTI yang memiliki agenda yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar dakwah. Selain itu, posisi pemaknaan kesetaraan gender yang berada di ranah hubungan antara manusia mendapatkan pemaknaan yang lebih mendalam karena diskursus dominan menggunakan sumber keberagaman yang lebih mendalam. Masyarakat tidak melihat hal ini sebagai perbedaan pemaknaan karena interpretasi yang berbeda, dan tidak melihat masalah perempuan dari sisi kepentingan perempuan.

Dalam situasi ini, kepemimpinan perempuan perlu melihat hal lebih luas daripada kepentingan perempuan yang diangkat dan dilaksanakan gerakan perempuan. Namun, tantangannya sungguh besar karena perlu mengembangkan *critical mass* yang memahami perspektif ini sekaligus melakukan pembacaan kembali sebagai usaha untuk mendentralisasi pemahaman berdasarkan pendekatan heterogender. Melalui pendekatan heterogender, masyarakat dapat memahami bahwa konstruksi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai heteronormativitas. Gerakan perempuan perlu menyadari bahwa laman virtual menjadi ajang untuk mengonstruksikan peran dan posisi perempuan. Ruang publik virtual menyasar individu dengan konstruksi yang secara gamblang menunjukkan peran perempuan berdasarkan konteks heteronormativitas.

Femininitas yang dikembangkan perlu mengangkat gambaran yang mampu mengkritisi konstruksi heterogender dengan tokoh seperti Menteri Susi yang memiliki karakter berbeda sebagai perempuan yang berhasil. Konstruksi femininitas perlu diperhatikan untuk mengangkat konstruksi femininitas alternatif. Artinya, dalam masyarakat terlihat konstruksi tentang perempuan yang beragam dan saling berkelindan, namun

perlu diangkat ruang publik virtual sebagai laman alternatif dari kegiatan gerakan perempuan. Dalam ruang publik virtual, muncul tokoh atau individu yang memainkan peran konstruksi terhadap peran perempuan. Para tokoh ini populer dan memiliki *follower* yang cukup banyak sehingga menghadirkan tantangan baru bagi gerakan perempuan.

PUSTAKA ACUAN

- Adam, A. (2017, Maret 14). Cara Indonesia memperlakukan perempuan. *Tirto.id*. Diakses pada 14 Maret 2017 dari <https://tirto.id/cara-indonesia-memperlakukan-perempuan-ckFf>
- Affiah, N.D. (2014). Gerakan perempuan di era reformasi, capaian dan tantangan, makalah untuk Hari Kartini 21 April 2014. Diakses pada 16 September 2016 dari http://www.komnas-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf. →laman tidak ditemukan
- Bennet, L.R., Davies S.G., & Hidayana, I.M. (2018). *Seksualitas di Indonesia, politik seksual, kesehatan, keberagaman dan representasi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hew, W.W. (2018, Januari 2). Piety, politics, and the popularity of Felix Siauw. *New Mandala*. Diakses pada 12 April 2018 dari <http://www.newmandala.org/piety-politics-popularity-felix-siauw/>
- Indonesia Imaji. (2018, Februari 27). Prospek pemimpin perempuan di Indonesia [foto]. Diakses pada? dari <http://indonesiaimaji.com/prospek-pemimpin-perempuan-di-indonesia/>
- Ingraham, C. (1994). The heterosexual imaginary: feminist sociology and theories of gender. *Sociological Theory*, 12 (2), 203–219. American Sociological Association. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/201865>.
- Jones, C. (2010). Better women: the cultural politics of gendered expertise in Indonesia. *American Anthropologist*, 112(2), 270–282. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/40801779>
- Kalyanamitra. (2013). Ancaman target MDG, angka kematian ibu melonjak. Diakses pada 27 Maret 2014 dari <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/09/ancaman-target-mdg-angka-kematian-ibu-melonjak-drastis/> →laman tidak ditemukan
- Komnas Perempuan. (tanpa tahun). Siaran pers Komnas Perempuan mengawal upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam regulasi dan pelaksanaan SDG's di Indonesia. Diakses pada 6 april 2018 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-komnas-perempuan-mengawal-upaya-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-regulasi-dan-pelaksanaan-sdgs-di-indonesia>
- Larasati, R.D. (2013, Oktober 1), Ranah tubuh dalam pemetaan gerakan perempuan, sebuah pemikiran tentang estetika, metodologi dan refleksi tentang konsep partisipasi dan visibilitas. Diakses pada 13 Juni 2016 dari <http://etnohistori.org/edisi-genealogi-gerakan-dan-studi-perempuan-indonesia-ranah-tubuh-dalam-pemetaan-gerakan-perempuan-oleh-rachmi-diyah-larasati.html>
- Muctar, Y. (2016). *Tumbuhnya gerakan perempuan Indonesia masa Orde Baru*. Jakarta: Institut Kapal Perempuan.
- Pernyataan sikap Indonesia beragam-ragam menunjuk stop perkawinan anak. (2017). Diakses pada 17 November 2017 dari <http://www.kalyanamitra.or.id/2016/11/pernyataan-sikap-indonesia-beragam-menuntut-stop-perkawinan-anak/> →laman tidak ditemukan
- Pramodhawardani J., Santoso W.M., Purwoko, D., & Ocktaviana S. (2014). *Perempuan dan hak asasi manusia*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Qibtiyah, A. (2009). Indonesian Muslim women and the gender equality movement. *Journal of Indonesian Islam*, 3, 168–196.
- Rahayu RI. (2007). Konstruksi historiografi feminisme Indonesia dari tutur perempuan, workshop historiography Indonesia: di antara historiography nasional dan alternatif. Yogyakarta 2–4 Juli, 2007. Diakses pada? dari https://www.academia.edu/3256748/Historiografi_Feminisme_Indonesia
- Santoso WM. (2013). Executive Summary Labsos IPSK, perempuan bisa pemberdayaan perempuan di Desa Ligarmukti daerah peri urban. (Makalah tidak diterbitkan). Jakarta: IPSK-LIPI.
- Santoso, W.M. (2015). Perempuan dan kebijakan: lemahnya representasi perempuan. Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III, Yogyakarta 20–23 Mei 2015.
- Santoso, W.M., & Djohan, E. (2016). Kajian gender dan tantangannya bagi perkembangan multidisiplin di Indonesia. Dalam W.M Santoso (ed.), *Ilmu sosial di Indonesia: perkembangan dan tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sunindyo, S. (1998). When the Earth is female and the nation is mother: gender, the armed forces and nationalism in Indonesia. *Feminist Review*, 58, 1–21, Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/1395677>

- Suryakusuma, J.I. (1996). The state and sexuality in New Order Indonesia. Dalam Sears L.J (ed.), *Fantasizing the feminine in Indonesia*. Durham, NC: Duke University Press.
- Wahid, M. (2014). *Figh Indonesia, kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.
- Wieringa, E.S. (1999). *Penghancuran Gerakan perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra.
- Wisnubrata, A. (ed.). (2012, November 23). Komnas Perempuan temukan 282 Perda diskriminatif. Kompas.com. Diakses pada 19 September 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/23/05393810/Komnas.Perempuan.Temukan.282.Perda.Diskriminatif>.

[https://www.youtube.com/watch?v=t6WoW1qJjsQ](https://www.google.com/search?biw=1360&bih=611&tbn=isch&sa=1&ei=BTLdWrmTAoeUvQTloZboAg&q=pemimpin+perempuan+indonesia&oq=pemimpin+perempuan+indonesia&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.920932.926426.0.927280.28.13.0.15.15.0.116.920.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.28.1044...0j0i67k1j0i10k1j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i19k1j0i30i19k1.0.wv5c6QeyI_8#imgrc=pPjJLw8ZVl41kM: gambar perempuan HTI anti pemimpin perempuan. Apakah maksudnya link ini? <a href=)

STT
NO.1052/SK/DITJEN/PPG/STT/1986

ISSN 977-0125-9989-1-9



LIPI Press